

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

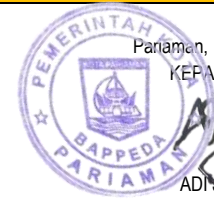
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PARIAMAN

TAHUN 2025-2029

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Unit Kerja Yang Bertanggung Jawab																																	
1	2	3	4	5	6	7																																	
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																																							
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1. Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (seperti dokumen RPJMD, Renstra, dll.) oleh suatu lembaga atau pemerintah daerah, termasuk evaluasi dan pengendaliannya. Indeks ini menghitung keselarasan dokumen perencanaan berdasarkan penilaian terhadap dokumen yang disusun dalam kurun waktu tertentu	$\text{Indeks Perencanaan Pembangunan} = 25\% \times \{ \text{Capaian Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja} \} + 25\% \times \{ \text{Capaian Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja} \} + 25\% \times \{ \text{Persentase target prioritas pembangunan daerah (RPJMD) yang tercapai} \} + 25\% \times \{ \text{Persentase pemanfaatan dokumen penelitian daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan} \}$	Data Laporan Bidang Perencanaan Bappeda	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																																	
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pembangunan Daerah	1. Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja adalah salah satu komponen sakip yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan.	<p>Nilai hasil evaluasi AKIP oleh Kemen PANRB dari komponen perencanaan kinerja</p> <p>LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Komponen</th> <th colspan="3">Sub-Komponen</th> <th rowspan="2">Total Bobot</th> </tr> <tr> <th>Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%</th> <th>Sub-Komponen 2 Kualitas 30%</th> <th>Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>12,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	Laporan Hasil Evaluasi oleh Menpan RI	
Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot																																			
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%																																				
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																			
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																			
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																			
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																			

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Unit Kerja Yang Bertanggung Jawab																																	
1	2	3	4	5	6	7																																	
		2. Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja adalah salah satu komponen sakip yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan.	<p>Nilai hasil evaluasi AKIP oleh Kemen PANRB dari komponen pengukuran kinerja</p> <p>LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Komponen</th> <th colspan="3">Sub-komponen</th> <th rowspan="2">Total Bobot</th> </tr> <tr> <th>Sub-Komponen 1 Keberadaan</th> <th>Sub-Komponen 2 Kualitas</th> <th>Sub-Komponen 3 Pemanfaatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>20%</td> <td>30%</td> <td>50%</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>12,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Sub-komponen			Total Bobot	Sub-Komponen 1 Keberadaan	Sub-Komponen 2 Kualitas	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan	Perencanaan Kinerja	20%	30%	50%	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	Laporan Hasil Evaluasi oleh Menpan RI	
Komponen	Sub-komponen			Total Bobot																																			
	Sub-Komponen 1 Keberadaan	Sub-Komponen 2 Kualitas	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan																																				
Perencanaan Kinerja	20%	30%	50%	30																																			
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																			
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																			
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																			
		3. Persentase Target Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD) yang Terpenuhi	Persentase Target Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD) yang Terpenuhi adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana target kinerja dari program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berhasil direalisasikan	<p>Persentase target prioritas pembangunan daerah (RPJMD) yang terpenuhi dapat dihitung dengan rumus :</p> $\text{Persentase target prioritas pembangunan daerah (RPJMD) yang terpenuhi} = \frac{\text{Jumlah sasaran prioritas pembangunan daerah yang terpenuhi sesuai target}}{\text{Jumlah seluruh prioritas pembangunan daerah}} \times 100\%$	Data Laporan Bidang Perencanaan Bappeda																																		
		4. Persentase pemanfaatan dokumen penelitian daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan	Persentase pemanfaatan dokumen penelitian daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan adalah ukuran yang menunjukkan proporsi dokumen kajian yang digunakan dalam perumusan kebijakan pembangunan.	<p>Persentase pemanfaatan dokumen penelitian daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan dapat dihitung dengan rumus :</p> $\text{Persentase pemanfaatan dokumen penelitian daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan} = \frac{\text{Jumlah dokumen kajian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan}}{\text{Jumlah seluruh dokumen kajian yang mendukung perencanaan pembangunan}} \times 100\%$	Data Laporan Bidang Perencanaan Bappeda																																		
3	Meningkatnya tatakelola pemerintahan daerah yang akuntabel serta pelayanan publik yang prima	1. Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah adalah skor hasil penilaian atas tingkat implementasi dan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada suatu perangkat daerah dalam periode tertentu, yang mencerminkan keterkaitan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal.	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Tim Penilai AKIP Inspektorat	LHE AKIP dari Inspektorat																																		

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Unit Kerja Yang Bertanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah angka yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah dalam periode tertentu, yang diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan unsur pelayanan yang telah ditetapkan	Hasil Survey Kepuasan Pelayanan yang dilakukan oleh OPD yang bersangkutan	Laporan Survey IKM	



Pariaman, September 2025
KEPALA BAPPEDA

ADINUNDAI, AP
NIP. 19750622 199501 1 001